

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DI DESA
CANDIREJO KECAMATAN PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI
HULU**

Thine Hapsari
Ernawati

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293, Telp/Fax
(0761) 63277

Abstrak

Kemiskinan adalah masalah serius yang menjadi perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Dalam upaya menanggulangi kemiskinan, pemerintah telah mengupayakan berbagai program salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan dan memberdayakan masyarakat miskin melalui program-program yang ada di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Mp). Namun pada kenyataannya masyarakat miskin tidak mampu ditanggulangi dan hanya sebagian masyarakat terperdayakan melalui program tersebut. Untuk itu pihak pelaksana kegiatan harus lebih maksimal dalam melakukan pelaksanaan program. Namun, pelaksanaan program sudah cukup baik tapi belum maksimal.

Kata Kunci: kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan PNPM-Mp

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia, kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan, kurangnya akses pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan social dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Diantara himpitan kesulitan kehidupan yang lain, kemiskinan merupakan problema utama yang harus dan setidaknya segera menjadi agenda utama yang menjadi prioritas bagi pemerintah. Tidak dipungkiri bahwa sinergi diantara kedua belah pihak antara masyarakat dan pemerintah harus berjalan dengan harmonis dan *feed back* (timbal balik) yang sempurna juga dalam proses pengentasan permasalahannya. Membahas profil masyarakat pastilah tidak terlepas dari menyoroitias masalah kemiskinan yang menjadikannya sebagai aspek paling dominan masyarakat.

Masalah kemiskinan ini menjadi perhatian yang sangat serius oleh pemerintah pusat maupun daerah. Untuk itu dituntut peran pemerintah agar lebih aktif dalam memberikan perhatiannya dalam upaya pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia saat ini.. Setelah kemiskinan dapat dipotret secara akurat, strategi anti kemiskinan dapat dikembangkan. Strategi tersebut sebaiknya menyentuh pendekatan langsung dan tidak langsung, mikro dan makro, yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Oleh karena itu, seharusnya kebijakan daerah tidak lagi bersifat selalu menerima dan seragam dari pemerintah pusat, namun justru Pemerintah Daerah yang mesti mengambil inisiatif dalam merumuskan kebijakan daerah yang sesuai dengan aspirasi, potensi dan sosio-budaya masyarakat didaerahnya.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah telah mengulirkan beberapa program yang sifatnya memberdayakan masyarakat miskin dengan bantuan pinjaman dana yang dapat dikelola oleh masyarakat agar dapat membangkitkan perekonomian masyarakat yang lemah dan dapat memberdayakan masyarakat melalui program-program yang dirancang oleh. Diantaranya adalah Program Pemberdayaan Desa (PPD) berdasarkan Keputusan Gubernur Riau No, 132/2005 tertanggal 31 Maret 2005. sebutan PPK berlaku untuk wilayah perkotaan, sementara untuk wilayah kabupaten dinamakan Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang diwujudkan dalam bentuk Usaha Ekonomi Kel-Simpan Pinjam (UED-SP) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, upaya ini diawali dengan peluncuran PNPM per 1 September 2006. Program tersebut kemudian dikukuhkan oleh Presiden RI sebagai PNPM Mandiri di kota Palu 30 April 2007. No:25/Kep/MENKO/KESRA/VII/2007 yang terdiri dari PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai berhasil dalam menjalankan programnya. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Tujuan Umum dari PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumberdaya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan

Misi PNPM Mandiri Pedesaan adalah:

- a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya,
- b. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif,
- c. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal,
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat,
- e. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. (PTO PNPM Mandiri Pedesaan : 3)

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam PNPM Mandiri Pedesaan dapat diklasifikasikan atas 4 jenis kegiatan yang meliputi :

- a. Kegiatan sarana dan prasarana sosial ekonomi,
- b. Kegiatan bidang pelayanan pendidikan,
- c. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok ekonomi
- d. Kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP),

Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP) adalah kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar dan memperkuat kelembagaan.

Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana yang disediakan untuk mendanai kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) perkecamatan maksimal 25% dari alokasi BLM.

- a. Sasaran, Bentuk Kegiatan dan Ketentuan kelompok SPP
 1. Sasaran Program yaitu rumah tangga miskin yang produktif
 2. Bentuk Kegiatan adalah memberikan dana dan pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman
- b. Ketentuan kelompok SPP
 1. Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama lain mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun
 2. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati
 3. Telah mempunyai modal dan simpanan anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota
 4. Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung baik
 5. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana

Dengan adanya tujuan dan ketentuan-ketentuan dasar pengelolaan Kegiatan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP) diharapkan kedepannya merupakan cikal bakal pembentukan masyarakat/perempuan yang aktif berperan dalam menanggulangi angka kemiskinan di desa dan berkembang melalui perguliran dana oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Pada intinya dana pinjaman yang bergulir untuk kelompok perempuan yang terdapat di desa terbuka terhadap segala usulan kegiatan yang sifatnya membangun masyarakat kearah yang lebih meningkatkan kesejahteraan dan melibatkan masyarakat miskin. Pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) memberikan bantuan sejumlah dana kepada kelompok perempuan miskin untuk berusaha dan ikut aktif dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan. Dana merupakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kabupaten Indragiri Hulu, masing-masing desa yang mendapat dana pinjaman tersebut berdasarkan kelayakan yang dimiliki untuk memperoleh bantuan dana. Kecamatan Pasir Penyau di Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu kecamatan yang mendapatkan bantuan dari Program Nasional Pembedayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan sejak tahun 2007 hingga sekarang. Kecamatan Pasir Penyau adalah termasuk jumlah masyarakat miskin yang banyak, oleh karena itu dengan kemauan keras dan tekad yang kuat pemerintah Kecamatan Pasir Penyau berupaya untuk mengentaskan kemiskinan di daerah ini. Oleh karena itu Kecamatan Pasir Penyau juga merupakan salah satu Kecamatan yang mendapatkan bantuan dari PNPM. Ini dapat dilihat dari data berikut.

Tabel I.2 Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Pasir Penyau 2011

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga	Rumah Tangga Miskin	Persentase
1	Pasir Keranji	89	22	22,71%
2	Air Molek I	1.019	290	28,45%
3	Candirejo	908	286	31,49%
4	Air Molek II	354	96	27,11%
5	Lembah Dusun Gading	42	13	30,95%
6	Petalongan	191	52	27,22%
7	Kembang Harum	350	79	22,57%
8	Batu Gajah	417	113	27,09%
9	Jatirejo	225	50	22,22%
10	Serumpun Jaya	124	21	16,93%
11	Tanjung Gading	324	47	14,50%
12	Sekar Mawar	651	102	15,66%
13	Tanah Merah	302	80	26,49%
		4996	1251	25,04%

Sumber : Kecamatan Pasir Penyau

Dapat dilihat bahwa jumlah rumah tangga miskin di Kecamatan Pasir Penyau cukup banyak. Desa Candirejo yang mempunyai persentase rumah tangga miskin paling banyak dibandingkan desa lain yang ada di Kecamatan Pasir Penyau dan Desa Candirejo sangat layak mendapatkan bantuan program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang pada dasarnya seluruh desa berhak mendapatkan pinjaman, untuk

masyarakat yang ingin menjadi pemanfaat dana pinjaman bergulir (SPP) yang memenuhi kriteria untuk menjadi pemanfaat.

Berdasarkan hasil prasurvey penulis dilapangan permasalahan yang terjadi pada kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Desa Candirejo adalah

- 1 Ketidaktepatan sasaran kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) yakni ada perempuan yang tidak tergolong miskin dalam Rumah Tangga Miskin (RTM) ikut serta dalam SPP dan pelaksanaan program tidak tepat sasaran karena banyak persepsi masyarakat yang menganggap dana pinjaman adalah dana hibah dari pemerintah yang tidak perlu mengembalikan dana pinjaman .
- 2 Partisipasi masyarakat yang rendah dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan SDM yang rendah, sehingga masyarakat tidak mampu mengelola pinjaman tersebut
- 3 Pemanfaat dana pinjaman yang kurang tepat berkembangnya usaha yang dijalankan dan sebagian besar kelompok masih banyak yang menunggak dalam membayar angsuran pinjaman dana. Hal ini berdasarkan temuan di lapangan yakni usaha yang mereka kelola tidak berkembang dan kemudian mereka tidak mau membayar dana pinjaman yang menyebabkan kredit usaha simpan pinjam macet

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Menurut **Qubria (dalam Surjono, 2007 : 41)** mengemukakan bahwa kemiskinan lebih ditekankan pada kondisi miskin sebagai individu yang membedakannya dari orang lain yang tidak miskin. Dengan kata lain, kemiskinan digunakan sebagai cara untuk mengklasifikasikan bahwa individu dikatakan miskin apabila dia tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan normalnya.

Untuk pengentasan kemiskinan adalah proses pemberdayaan terhadap masyarakat miskin itu sendiri. Pemberdayaan selalu mengacu kepada kelompok masyarakat yang berada pada lapisan bawah.

Specker dalam Darwin (2005:3) menyatakan kemiskinan mencakup (1) kekurangan fasilitas fisik bagi kehidupan yang normal, (2) gangguan dan tingginya resiko kesehatan, (3) resiko keamanan dan kerawanan kehidupan sosial ekonomi dan lingkungannya, (4) kekurangan pendapatan yang mengakibatkan tak bisa hidup layak, dan (5) kekurangan dalam kehidupan sosial, ketersisihan dalam proses politik, dan kualitas pendidikan yang rendah.

Menurut **Gunawan (1999 : 254-255)** Pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan serta meningkatkan kemandirian masyarakat. Dalam kerangka pembangunan nasional, upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang pertama, penerapan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang, kedua, peningkatan kemampuan masyarakat dalam

membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan prasarana dan sarana yang baik fisik maupun sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah, ketiga, perlindungan melalui pemihakan kepada yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.

Selanjutnya menurut **Siagian (2002 : 72)** mengemukakan bahwa pemberdayaan sumber daya manusia adalah upaya yang dilakukan untuk menggali dan membangkitkan segenap potensi yang ada dalam diri manusia itu agar dapat memberi manfaat bagi diri dan lingkungannya. Sesungguhnya manusia punya potensi adakalanya potensi itu bangkit dengan sendirinya adakala potensi itu bangkit perlu digerakkan.

Menurut **Suharto (2006 : 61)** peran program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui bantuan dana yang dapat diciptakan dari kegiatan sosial ekonomi harus menganut beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat kelompok sasaran (*acceptable*)
2. Dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan (*accountable*)
3. Memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (*profitable*)
4. Hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat (*sustainable*)
5. Pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas

Menurut **Stephen P.Robbins (2003 : 176)** suatu struktur organisasi menetapkan cara tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Ada enam unsure kunci yang perlu disampaikan kepada manajer bila mereka merancang struktur organisasinya. Elemen-elemen tersebut adalah : spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, serta formalisasi.

Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri melalui pemberdayaan masyarakat. Pengembangan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan dan penguatan koordinasi serta sinergi sektoral dalam pembangunan desa secara partisipasif. Secara konseptual pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat, sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri.

Ada beberapa program yang telah diluncurkan oleh pemerintah untuk membantu atau meningkatkan perekonomian masyarakat salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. Untuk lebih jelas mengenai Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM_Mp dalam penelitian ini, maka usaha yang dilakukan adalah

dengan menganalisis pelaksanaan PNPM-Mp di Desa Candirejo. Dengan ini penulis uraikan secara rinci mengenai indikator pelaksanaan program yang ada. Adapun indikator analisis pelaksanaan PNPM-Mp dalam penelitian ini adalah :

1. *Acceptable*
2. *Accountable*
3. *Profitable*
4. *Sustainable*
5. *Replicable*

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang bagaimana pelaksanaan Program Nasional Pemberayaan Masyarakat Mandiri, ditemukan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Nasional Pemberayaan Masyarakat Mandiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah:

1. **Sumber Daya Manusia**
2. **Faktor Sosial Ekonomi**
3. **Kerja Sama**
4. **Pola pikir dan tanggung jawab masyarakat**

Metode

Penelitian ini tergolong ke dalam analisa deskriptif yang menjelaskan pelaksanaan PNPM-Mp di Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupten Indragiri Hulu. Pembahasan diarahkan kepada bagaimana pelaksanaan program PNPM-Mp dalam menjalankan tujuannya. Sementara itu informan penelitian adalah informan yang paham akan pelaksanaan PNPM-Mp dan informasi lainnya yang dapat mendukung penjelasan.

Hasil

Untuk membahas masing-masing indikator dari variabel pelaksanaan PNPM-Mp di Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupten Indragiri Hulu digunakan beberapa pertanyaan, melalui daftar pertanyaan (wawancara). Untuk mengetahui pelaksanaan PNPM-Mp di Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupten Indragiri Hulu dapat dilihat dari indikator variabel penelitian, yaitu:

1. *Acceptable*

Acceptable yaitu mudah diterima oleh masyarakat kelompok sasaran maksudnya untuk mendapatkan pendanaan dari program simpan pinjam kelompok perempuan ini diberikan kemudahan untuk calon peminjam, pada *acceptablenya* masyarakat/perempuan miskin yang mendapatkan pendanaan kebutuhan dan sub indikatornya yaitu :

- a. Mudah mendapatkan pendanaan

Mudah mendapatkan pendanaan mempengaruhi berjalannya program yang dijalankan, Keberhasilan pelaksanaan sebuah program juga ditentukan kemudahan mendapatkan pendanaan dari program itu sendiri. Begitu pula dengan program dan pencapaian tujuan kegiatan. Berikut adalah wawancara mengenai pentingnya kemudahan mendapatkan pendanaan simpan pinjam kelompok perempuan :

“Pihak UPK bekerjasama dengan pihak desa/kelurahan dan pihak desa/kelurahan menyampaikan kemasyarakat melalui RT-RT setempat untuk diadakan musyawarah desa yakni dari UPK PNPM-Mp ada program untuk masyarakat desa untuk penambahan modal yakni simpan pinjam kelompok perempuan dengan membentuk kelompok peminjam dan mengajukan proposal yang telah ditentukan UPK PNPM-Mp dan akan diproses”. **(Wawancara dengan Ketua UPK Lancang Penyau 27 September 09:30)**

Dari hasil wawancara dengan Ketua UPK Lancang Penyau dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara pihak desa dengan para ketua RT yang terdapat di Desa Candirejo yang telah diutus oleh UPK PNPM-Mp masyarakat Desa Candirejo dapat mengetahui bahwa ada program dari pemerintah untuk masyarakat yang membutuhkan tambahan modal dengan meminjam modal melalui dana simpan pinjam kelompok perempuan harus mengajukan proposal dengan membentuk kelompok peminjam yang beranggotakan paling sedikit 5 orang per kelompok, dan sudah memiliki usaha yang akan dikembangkan melalui Simpan Pinjam Kelompok Perempuan.

b. Cepat Tanpa Syarat Agunan

Di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan khususnya program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan untuk dapat meminjam dana pinjaman tidak dikenakan agunan, yakni sebagai jaminan pinjaman yang akan mempercepat proses peminjaman dana. Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan Ketua UPK Lancang Penyau Kecamatan asir Penyau mengenai peminjaman cepat tanpa syarat agunan :

“Proses peminjamannya sangat mudah karena di program pemberdayaan hanya jaminan tanggung renteng tanpa agunan yakni 1 anggota kelompok yang bermasalah anggota yang lain menutupi agar tidak terjadi penunggakan di kelompok peminjam”. **(Wawancara dengan Ketua UPK Lancang Penyau 27 September 09:30).**

berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua UPK Lancang Penyau Kecamatan Pasir Penyau diketahui bahwa proses peminjamannya sangat mudah karena dalam program simpan pinjam kelompok perempuan tidak terdapat agunan seperti di bank atau PT yang bisa meminjamkan dana tapi tidak secara cuma-cuma.

1. *Accountable*

Dana yang dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan maksudnya adalah dari dana pinjaman yang berasal dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan khususnya Simpan Pinjam Kelompok Perempuan mampu dikelola oleh pemanfaat program dan dapat membuahkan hasil

yang dapat merubah kehidupan masyarakat ke arah yang maju , sub indikatornya sebagai berikut :

a. Ada atau tidak perubahan pada sasaran program

Dalam menjalankan suatu program perubahan pada sasaran program sangat diharapkan oleh pengelola program SPP ini, yaitu perubahan pada sasaran program menandai keberhasilan pengelola dalam menjalankan program SPP ini. Berikut adalah wawancara dengan Ketua UPK Lancang Penyau mengenai ada atau tidaknya perubahan pada sasaran program pada SPP UPK Lancang Penyau :

“Tergantung sih sebenarnya ada yang merasa kalau mereka ini adalah sumber mata pencarian dari simpan pinjam kelompok perempuan untuk usaha yang mereka jalani karena mereka dapat penambahan modal mereka merasa mendapatkan penghidupan buat mereka yang sungguh-sungguh memnfaatkan dana pinjaman sangat membantu dan sasaran program tercapai tetapi masih ada sampai saat ini yang menganggap ini adalah dana uang Negara yang diberi oleh Pemerintah secara Cuma-Cuma tanpa perlu dikembalikan atau dibayar dan tidak ada kesadaran dari pemanfaat untuk mengembalikan pinjaman tersebut”. **(Wawancara dengan Ketua UPK Lancang Penyau 27 September 09:30)**

Melalui hasil wawancara dapat diketahui bahwa ada atau tidaknya perubahan yang terjadi pada program sasaran program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yakni kurang mengalami perubahan, karena dana pinjaman tersebut dialokasikan untuk kebutuhan lain seperti membayar sekolah anak, membayar listrik dan lainnya yang sangat jelas di luar tujuan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan.

b. Seberapa besar perubahan kelompok sasaran

Dalam menjalankan usaha dalam suatu program perubahan pasti diharapkan yakni perubahan ke arah yang lebih maju begitu juga dengan kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan diharapkan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik seperti dari dana pinjaman dapat mengembangkan potensi kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan ketua UPK Lancang Penyau Kecamatan Pasir Penyau mengenai seberapa besar perubahan pada kelompok sasaran yang terjadi di Desa Candirejo :

“Berdasarkan hasil pengamatan pihak UPK di Kecamatan Pasir Penyau, desa/kelurahan yang ada di kecamatan pasir penyau yang program pemberdayaan melalui SPP nya berhasil memperlihatkan perubahan pada taraf hidup masyarakat tetapi khususnya untuk di Desa Candirejo kami lihat hanya sedikit masyarakat yang terbantu ekonominya atau meningkatnya kehidupannya karena program SPP ini”.

(Wawancara dengan Ketua UPK Lancang Penyau 27 September 09:30).

Dari hasil wawancara dengan Ketua UPK Lancang Penyau dapat diketahui bahwa pada umumnya program pemberdayaan melalui simpan pinjam kelompok perempuan yang terdapat di UPK Lancang Penyau sudah berhasil yakni terlihat peningkatan pada taraf kehidupan masyarakat di Kecamatan Pasir Penyau yang memanfaatkan program simpan pinjam kelompok perempuan tersebut dengan

meningkatnya usaha dan pendapatan dari usaha yang dikelola tetapi khususnya untuk Desa Candirejo.

2. *Profitable*

Memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis yakni dana hasil Simpan Pinjam Kelompok Perempuan tersebut dapat dimanfaatkan berdasarkan kebutuhan kegiatan usaha yang dirintis melalui pelatihan bagaimana mengelola dana pinjaman dari Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang diberikan agar masyarakat mengerti akan tujuan dan kegunaan dari dana pinjaman, sub indikatornya :

a. Apakah pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Lancang Penyus sudah mengarah pada tujuan dari SPP itu sendiri

Untuk mengetahui pelaksanaan program simpan pinjam kelompok perempuan sudah mengarah pada tujuan dari simpan pinjam kelompok perempuan. Berikut adalah hasil wawancara dengan Ketua UPK Lancang Penyus :

“Pelaksanaan program ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan bisa memberdayakan kelompok perempuan agar terjadi kesetaraan gender dan bagaimanapun perempuan itu dapat mengungkapkan satu permasalahannya dengan ada pertemuan yang di adakan pihak UPK dan sekarang ibu-ibu sudah mulai berani karena tujuan program SPP ini ditujukan untuk ibu-ibu yang termasuk kedalam Rumah Tangga Miskin (RTM) yang mempunyai kelompok peminjam serta usaha yang sudah digeluti oleh masing-masing anggota tidak berlaku untuk bapak-bapak”.

(Wawancara dengan Ketua UPK Lancang Penyus 27 September 09:30)

Pelaksanaan program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan sudah sesuai dengan sebagaimana yang diatur pelaksanaan SPP berjalan lancar, dan disalurkan pada sasaran yang tepat agar tujuan dari SPP ini dapat tercapai. Tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan tujuan dari program ini tidak tercapai.

b. Mempunyai prosedur dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman

Berikut adalah wawancara dengan Ketua UPK Lancang Penyus mengenai prosedur dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman yang terdapat diprogram simpan pinjam kelompok perempuan :

“Secara prosedur ada yang dilalui ada aturan utamanya tahapan-tahapannya dilalui dan kami selaku pengelola didampingi pendamping desa dan kemudian dibantu oleh perangkat-perangkat desa mensosialisasikan kegiatan SPP kepada masyarakat mengenai apa itu program SPP beserta tujuan dan selanjutnya anggota mengajukan secara berkelompok dalam bentuk proposal setelah itu di verifikasi kemudian diputuskan dalam rapat tim pendanaan kalau PNPM dalam musyawarah antar desa (MAD)”. **(Wawancara dengan Ketua UPK Lancang Penyus 27 September 09:30).**

Dari hasil wawancara di atas dengan Ketua UPK Lancang Penyus dapat disimpulkan bahwa untuk mengelola simpanan dan pengelolaan pinjaman mempunyai aturan yang harus diikuti prosedurnya melalui hubungan kerjasama antara pihak desa dan pihak pelaksana kegiatan untuk disosialisasikan mengenai

program simpan pinjam kelompok perempuan mengenai program simpan pinjam kelompok perempuan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, memperdayakan masyarakat dan meningkatkan pembangunan daerah yang dimulai dari terkecil.

3. Sustainable

Setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan, sub indikatornya yaitu : Seberapa besar signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran yang telah dicapai. Untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Berikut adalah wawancara dengan Ketua UPK Lancang Penyau yaitu berapa besar signifikan yang terjadi pada kelompok sasaran yang telah dicapai oleh Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan yang terdapat di Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyau :

“Perubahan yang terjadi cukup mengalami perkembangan dilapangan mengenai usaha yang dimiliki oleh kelompok sasaran pemanfaat dana pinjaman modal usaha dari kegiatan SPP di Desa Candirejo karena setelah mereka meminjam dan ketika kami melakukan pembinaan mungkin yang warungnya yang biasanya belum lengkap kini sudah menambah, yang dulunya warungnya kecil sekarang sudah besar dan padat begitu juga dengan usaha yang lainnya seperti usaha jualan lontong juga mengalami peningkatan yang dulu berjualan dengan menggunakan tenda saat akan jualan dan kini mereka sudah mempunyai warung lontong yang permanent. Tetapi memang dalam hal ini kami masih sangat menyayangkan sampai sekarang masih adanya tunggakan yang dimiliki oleh pemanfaat. Setelah dilakukan pengecekan dilapangan, pemanfaat tersebut mengatakan belum ada uang untuk melunasi angsuran pinjaman modal mereka, karena hasil penjualan dari usaha mereka kurang dan hanya mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari”. **(Wawancara dengan Ketua UPK Lancang Penyau 27 September 09:30).**

Dari hasil wawancara oleh Ketua UPK Lancang Penyau di atas dapat diketahui bahwa perubahan yang terjadi pada sasaran kelompok sudah mengalami perkembangan yang cukup baik yakni perkembangan usaha yang mereka rintis sudah mengalami kemajuan seperti perkembangan usaha yang awalnya usaha yang sasaran kelompok rintis sebelum bergabung dengan Program nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan belum mengalami peningkatan tetapi setelah berpartisipasi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan khususnya Simpan Pinjam Kelompok Perempuan sasaran program kini mendapatkan dana pinjaman dari program dan dilakukan pembinaan seperti mengelola uang dan usaha yang akan dijalankan maka dari itu banyak terjadi peningkatan.

4. Replicable

Proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir

guna meningkatkan kesejahteraan yaitu : dengan tercapainya tujuan dari program maka bisa memberdayakan masyarakat dan tingkat kemiskinan berkurang.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Ketua UPK Lancang Penyau mengenai tercapainya tujuan dari program maka bisa memberdayakan masyarakat dan tingkat kemiskinan berkurang di program simpan pinjam kelompok perempuan di Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyau :

“Setelah berjalannya tujuan dari program SPP di Desa Candirejo tidak banyak masyarakat miskin yang benar-benar merasakan perubahan dari program SPP ini pada tingkat kemajuan hasil usaha dan tingkat perekonomiannya, ini disebabkan karena kurangnya pengalaman dalam berusaha, SDM yang masih rendah dan program ini tidak berhasil dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak mempunyai etika yang baik dalam berusaha dan hanya ingin mendapatkan uang secara Cuma-Cuma yang mereka anggap adalah dana hibah dari pemerintah dan pemikiran seperti inilah yang menyebabkan tingkat kemiskinan belum berkurang”.

(Wawancara dengan Ketua UPK Lancang Penyau 27 September 09:30)

Dari hasil wawancara dengan Ketua UPK Lancang Penyau dapat kita ketahui bahwa “tidak baik” karena melalui simpan pinjam kelompok perempuan ini tidak banyak masyarakat yang terperdaya dimana tujuan dari program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan untuk memberdayakan masyarakat miskin dan hanya sebagian kecil masyarakat yang meningkat perekonomiannya dari usaha yang dijalankan melalui program SPP.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PNPM-MP di Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PNPM-MP di Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dimaksudkan adalah salah satu faktor penting dalam keberhasilan sebuah program, semakin berkualitas sumber daya manusianya semakin tercapai tujuan dari program yang dijalankan. Didalam menjalankan PNPM-Mp ini pengelola harus memiliki SDM yang baik agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik yakni pengelola yang mempunyai tingkat pendidikan yang bagus, pengalaman serta kehidupan sosial yang baik dalam masyarakat, pihak pengelola juga harus memiliki komitmen dalam melaksanakan kegiatan yang ada di dalam program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM-Mp) ini. Dalam melaksanakan kegiatan program tersebut mereka harus lebih memperhatikan apa yang menjadi sasaran dan tujuan dari kegiatan program yang akan mereka kelola.

kualitas sumber daya manusia pengelola dan pemanfaat yang baik yaitu dari segi pendidikan maupun kehidupan sosial dimasyarakat, cara berkomunikasi dan mempunyai kharismatik diharapkan pemanfaat percaya pada pengelola mau

mengikuti saran dari pengelola seperti bimbingan atau pelatihan yang diberikan untuk dapat memajukan dan tujuan SPP.

2. Faktor Sosial Ekonomi

Faktor sosial masyarakat juga berpengaruh di dalam pelaksanaan PNPM-Mp yakni pemanfaatan dana pinjaman, banyak pemanfaat yang menggunakan dana pinjaman ini diluar tujuannya yaitu dana yang seharusnya digunakan untuk pengembalian tetapi digunakan untuk kepentingan lain terlebih dahulu seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga hasil dari program ini tidak tampak dikarenakan dana habis bukan untuk kebutuhan program.

3. Kerja Sama

Adanya hubungan kerja sama yang baik dapat meningkatkan program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan agar pencapaian tujuan program dapat tercapai dengan maksimal. Jika kerjasama antara pengelola, pemanfaat dan semua pihak yang berhubungan dengan program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan terlaksana dengan baik maka kemajuan program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan akan tercapai. Pihak dari pelaksana program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan harus bahu-membahu untuk kemajuan program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan seperti kerjasama yang baik di dalam UPK dan didukung oleh peran masyarakat (pemanfaat) yang bekerjasama.

Kesimpulan yang didapat bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan diperlukan adanya saling kerjasama antara pengelola, pemanfaat dan semua pihak yang terkait apabila muncul suatu masalah maka harus segera diselesaikan agar masalah tidak menjadi besar yang dapat mempengaruhi berjalannya program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan.

4. Pola pikir dan tanggung jawab masyarakat

Pola pikir masyarakat dalam hal ini juga berpengaruh di dalam pelaksanaan program SPP. Apabila pola pikir masyarakat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada program spp maka pelaksanaan SPP secara tidak langsung akan berpengaruh pada keberhasilan program.

Menurut penulis dapat disimpulkan bahwa Pemanfaat tidak lancar dalam pembayaran angsuran karena lebih mementingkan kepentingan pribadi serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab sebagai pemanfaat SPP yang bakal berpengaruh terhadap program SPP kedepannya.

Simpulan

Pelaksanaan PNPM-Mp adalah program untuk menanggulangi angka kemiskinan dan mampu memberdayakan masyarakat miskin. Tapi pada kenyataannya pelaksanaan program tidak berjalan dengan baik, karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PNPM-Mp dalam menjalankan program kepada. Faktor-faktor itu diantaranya adalah Sumber daya manusia, faktor sosial ekonomi, kerjasama serta konpensasi atau insentif serta pola pikir dan tanggung jawab masyarakat. Bila semua faktor tersebut telah terpenuhi maka pelaksanaan PNPM-Mp terlaksana

dengan baik dan mencapai tujuan untuk mensejahterakan rakyat serta memberdayakan masyarakat miskin.

Daftar Pustaka

Darwin, M.Muhadir. *memanusiakan Rakyat Penanggulangan Kemiskinan Sebagai Arus Utama Pembangunan*, Yogyakarta : Benang Merah, 2005.

P.Robbins, Stephen. *Perilaku Organisasi Jilid 2*, Indonesia : PT INDEKS Kelompok GRAMEDIA, 2003.

Siagian, Sondang. P. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : penerbit PT Bumi Aksara, 2002.

Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial)*. Bandung: Aditama, 2006

Sumodiningrat, Gunawan. *Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Surjono, Agus. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang : UM Pers, 2007.

Dokumen :

Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri pedesaan, Jakarta : Tim Koordinasi PNPM Mandiri. 2007